



Peran Gereja dalam Merespons Konflik Sosial yang Dialami Masyarakat Adat di Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan

Hulu Yerdin Kobak¹

¹Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi : hulu.kobak@sttekumene.ac.id¹

Abstract. Social conflicts experienced by indigenous peoples in Yahukimo Regency, Papua Pegunungan, reveal the vulnerability of civilians due to violence, displacement, and weak protection of basic rights in situations of prolonged conflict. These conditions indicate a gap between conflict management policies and the real needs of indigenous peoples for justice, peace, and social recovery. This study aims to analyze the role of the church in responding to social conflicts experienced by indigenous peoples in Yahukimo Regency. This study was conducted using qualitative methods through a descriptive-analytical approach based on literature studies and analysis of the socio-religious context of Papua. This study confirms that the church has a strategic role as an agent of peace and a prophetic voice in defending the dignity and rights of indigenous peoples amid social conflict. The results of the study show that the church's involvement in pastoral counseling, humanitarian advocacy, and peace awareness building contributes to strengthening the social resilience of indigenous peoples. The study concludes that the role of the church needs to be directed in a more contextual and sustainable manner in order to promote fair and dignified conflict resolution. The recommendations of this study emphasize the importance of strengthening the role of the church in peace dialogue and cross-stakeholder cooperation for the social recovery of indigenous peoples in Yahukimo.

Keywords: Church; Indigenous Communities; Papua; Social Conflict; Yahukimo Mountains

Abstrak. Konflik sosial yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, memperlihatkan kerentanan warga sipil akibat kekerasan, pengungsian, serta lemahnya perlindungan hak-hak dasar dalam situasi konflik yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan penanganan konflik dan kebutuhan nyata masyarakat adat akan keadilan, perdamaian, dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gereja dalam merespons konflik sosial yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis yang bertumpu pada studi literatur dan analisis konteks sosial-keagamaan Papua. penelitian ini menegaskan bahwa gereja memiliki peran strategis sebagai agen perdamaian dan suara profetis dalam membela martabat serta hak masyarakat adat di tengah konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dalam pendampingan pastoral, advokasi kemanusiaan, dan pembangunan kesadaran damai berkontribusi pada penguatan ketahanan sosial masyarakat adat. Penelitian menyimpulkan bahwa peran gereja perlu diarahkan secara lebih kontekstual dan berkelanjutan agar mampu mendorong penyelesaian konflik yang adil dan bermartabat. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran gereja dalam dialog perdamaian dan kerja sama lintas pemangku kepentingan demi pemulihan sosial masyarakat adat di Yahukimo.

Kata kunci: Gereja; Konflik Sosial; Masyarakat Adat; Papua; Pegunungan Yahukimo

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Yahukimo adalah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia, yang dikenal dengan topografi pegunungan dan lembah yang bervariasi, kaya akan suku asli Papua (seperti Yali, Hublaa, Kimyal, Momuna), dan memiliki pusat pemerintahan resmi di Sumohai, dari 51 distrik 510 desa atau kampung di bumi yahukimo. meskipun seringkali administrasi dijalankan di Dekai karena infrastruktur. Secara umum, Yahukimo adalah wilayah dengan potensi sumber daya alam melimpah (pertanian, hutan) namun menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dan keamanan. Karakteristik Umum Yahukimo: Lokasi &

Geografi: Terletak di Papua Pegunungan, dengan ketinggian bervariasi (100-3.500 mdpl), didominasi hutan dan pegunungan (sekitar 60%). Asal Nama: Nama Yahukimo berasal dari gabungan suku Yali, Hublaa, Kimyal, dan Momuna. Pemekaran: Merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya pada 11 Desember 2002. Suku & Budaya: Rumah bagi belasan suku asli dengan kekayaan budaya unik, sering ditampilkan dalam festival budaya. Ekonomi: Ditopang oleh pertanian (padi ladang) dan hasil hutan (buah merah, rotan, gaharu). Pusat Pemerintahan: Resmi di Sumohai, namun sementara di Dekai karena fasilitas terbatas. Tantangan Pernah dikenal dengan isu perang suku dan kanibalisme di masa lalu, kini menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Secara ringkas, Yahukimo adalah wilayah pegunungan yang secara alami indah dan kaya suku, namun masih dalam proses pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung potensi ekonominya.

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Yahukimo masih menghadapi berbagai kendala struktural yang berdampak pada rendahnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di kalangan masyarakat adat. Meskipun pemerintah telah menjalankan sejumlah program, capaian penerbitan KK belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Tantangan konflik yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur fisik dan digital, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan turut memperparah situasi ini. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga memicu kerentanan sosial dan konflik struktural yang dialami masyarakat adat. Dalam konteks inilah, peran gereja menjadi penting sebagai aktor sosial dan moral yang hadir di tengah masyarakat untuk mendorong kesadaran, memperkuat partisipasi warga, serta merespons konflik sosial yang muncul akibat ketimpangan pelayanan publik di Kabupaten Yahukimo. (Wetipo dan Ismail 2025).

Dalam surat resmi yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2025, disampaikan pemberitahuan kepada sejumlah lembaga struktural di Kabupaten Yahukimo, termasuk Panglima TNI. Surat tersebut menegaskan pentingnya pernyataan terbuka dari Panglima TNI bahwa guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Yahukimo merupakan warga sipil yang bersifat netral serta tidak memiliki keterkaitan dengan institusi militer. Penegasan ini dipandang krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi membahayakan keselamatan para guru dan tenaga kesehatan di tengah situasi konflik sosial. (Sihombing 2025) Selain itu, Komnas HAM juga menekankan agar setiap kebijakan dan komunikasi yang berkaitan dengan penanganan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) senantiasa mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pendekatan

yang berorientasi pada perlindungan ini diperlukan guna meminimalisasi dampak negatif di lapangan, khususnya terhadap masyarakat adat Yahukimo yang rentan menjadi korban konflik. Berdasarkan kajian Yudhy Sanjaya dkk., masih terdapat kesenjangan penelitian yang menunjukkan perlunya studi yang lebih spesifik, kontekstual, dan aplikatif. Kesenjangan ini menjadi relevan dengan artikel berjudul “Peran Gereja dalam Merespons Konflik Sosial yang Dialami Masyarakat Adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan”, karena konflik sosial yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik kontemporer yang mempengaruhi kehidupan masyarakat adat. (Sanjaya, Huatama, dan Tafonao 2024) Oleh sebab itu, pendekatan teologis yang dikaitkan dengan realitas politik aktual dapat menghadirkan perspektif baru mengenai tanggung jawab gereja dalam iman Kristen untuk berkontribusi secara konstruktif. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan gereja dalam mendorong kebijakan publik yang berkeadilan, memperkuat dialog antaragama, serta mendukung kehidupan pluralistik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip iman Kristen. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi berupa perspektif teologis Kristen yang dipadukan dengan analisis politik lokal guna mengeksplorasi peran kepemimpinan gereja yang bijaksana dalam merespons dan mentransformasi konflik sosial di tengah masyarakat Yahukimo.

Sedang penelitian terdahulu telah menaruh perhatian pada peran etika Kristen dalam merespons realitas konflik di tengah masyarakat plural. “Yosua Yan Heriyanto (2025), misalnya, menekankan pentingnya pengembangan konsep moderasi beragama dalam perspektif etika Kristen sebagai upaya membangun sikap iman yang terbuka dan relasional. Fokus kajian tersebut diarahkan pada pencarian titik temu antar umat beragama guna menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah potensi konflik berbasis agama. (Heriyanto 2025)

Fenomena yang dilaporkan dari TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI dimana masyarakat yahukimo berhadapan dengan konflik di momen natal tahun 2025 ini, merupakan departemen Hukum dan HAM Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto serta Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto segera menghentikan operasi militer di Tanah Papua, khususnya pada momentum perayaan Natal. Dalam siaran pers diterima Tribun-Papua.com, Kamis (18/12/2025), oleh ketua Departemen Hukum dan HAM GIDI Pendeta Jimmy Koirewoa, menegaskan, Natal merupakan hari yang suci dan istimewa bagi umat Kristen di Tanah Papua, Indonesia, dan seluruh dunia. Negara wajib menghormati kebebasan beragama serta menjamin rasa aman umat dalam menjalankan ibadah Natal, bukan justru menghadirkan ketakutan melalui operasi militer di pemukiman warga dan rumah-rumah hamba Tuhan. (Nurjannah Kurita 2025) Tindakan aparat tidak hanya

menimpa rumah Pendeta Victor Kobak, tetapi juga beberapa rumah warga sipil lainnya yang digerebek, sehingga sebagian besar warga terpaksa mengungsi ke kota karena rasa takut dan trauma.

Dalam penelitian artikel ini bertujuan adalah untuk menganalisis peran gereja dalam merespons konflik sosial yang dialami oleh masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, khususnya dalam situasi meningkatnya kehadiran aparat keamanan yang berdampak pada rasa aman, kebebasan beragama, dan kehidupan sosial masyarakat. Dan bagaimana gereja, sebagai institusi iman dan aktor sosial, menyuarakan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan perlindungan martabat manusia di tengah praktik kekerasan struktural yang menimbulkan trauma dan pengungsian warga. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi sikap teologis dan praksis gereja dalam menanggapi konflik yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beribadah, serta kontribusi gereja dalam membangun rekonsiliasi dan keadilan sosial bagi masyarakat adat Papua.

2. METODE PENELITIAN

Definisi dari metode penelitian yaitu teknik yang digunakan untuk konstruksi oleh bakat atau kemampuan memandang daripada sisi positif dan menjadi salah satu modal dasar untuk masuk dalam pelayanan. Menurut "Sugiyono" Bila mereka tidak didukung oleh kemampuan atau keterampilan yang memenuhi standar, maka sulit bagi mereka untuk terlibat dalam konflik. Salah satu faktor pendorong keterlibatan para pemimpin gereja.(Sugiyono 2013). Untuk kemajuan suatu organisasi baik itu profit gerejawi maupun non profit terletak ditangan umat rakyat tersebut.

penelitian artikel ini peneliti menggunakan metode Kualitatif dan deskriptif, dengan pendekatan fenomena yang diteliti secara sistematis dan pada objektif. Penelitian survei dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai peran gereja dalam merespons konflik sosial yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama, yang ditujukan kepada responden yang relevan, seperti pelayan gereja dan anggota masyarakat adat, guna menggali pandangan, pengalaman, serta bentuk keterlibatan gereja dalam situasi konflik sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami peran gereja dalam konteks konflik sosial serta kontribusinya terhadap upaya perdamaian dan pemulihan sosial masyarakat adat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gereja memiliki posisi strategis dalam merespons konflik sosial yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, terutama karena gereja tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memiliki legitimasi moral di tengah komunitas adat.(Paragaye 2025), Dalam konteks konflik sosial yang sering dipicu oleh ketegangan politik, perebutan kepentingan, dan lemahnya mekanisme mediasi formal, gereja tampil sebagai ruang aman bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan serta mencari jalan damai. Peran ini menjadi signifikan karena gereja memiliki kedekatan historis dan kultural dengan masyarakat adat Yahukimo, sehingga mampu menjembatani komunikasi antara komunitas akar rumput, pemimpin adat, dan pemerintah.

Konflik sosial yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tidak dapat dilepaskan dari dinamika eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di wilayah tersebut. Salah satu pemicu utama konflik adalah aktivitas pertambangan emas di wilayah Korowai yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. (Hulu Kobak,2025, hlm. 1132) menjelaskan bahwa wilayah Korowai merupakan kawasan pedalaman Papua yang kaya akan sumber daya alam, khususnya potensi tambang emas, sekaligus wilayah yang masyarakatnya masih hidup sangat dekat dengan alam serta menjaga hutan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Namun, masuknya kepentingan negara dan investor melalui eksploitasi tambang emas, baik oleh perusahaan besar maupun penambang ilegal, telah menimbulkan persoalan ekologis dan sosial yang serius. (kobak.2025) Sedangkan menurut, (AMOS ARSS,POL SIMBOLON, 2025) mengatakan adalah situasi tersebut masyarakat adat merupakan bagian integral dari sistem sosial dan kultural bangsa Indonesia yang memiliki hak ulayat atas tanah sebagai warisan turun-temurun. Hak ulayat bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan identitas budaya yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. memperlihatkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adat, seperti hilangnya ruang hidup, rusaknya tatanan sosial-budaya, serta meningkatnya ketegangan antara masyarakat, negara, dan aktor ekonomi.(Simbolon 2025)

Peran Gereja dalam Merespons Konflik

Peran gereja dalam Memperkuat Kesadaran Sosial Dan Perdamaian Gereja di yahukimo juga berperan sebagai agen perubahan sosial, terutama dalam isu-isu keadilan sosial dan hak asasi manusia. Di berbagai gerakan,gereja menjadi suara atau yang menjadi garda

terdepan dalam membantu menyuarakan bagi mereka yang terpinggirkan atau terabaikan, seperti komunitas minoritas, etnis, agama, dan masyarakat miskin. Selain itu, gereja juga ikut berperan dalam melakukan upaya perdamaian di tengah besarnya konflik etnis dan agama yang sering menjadi pemicu perpecahan umat Tuhan dan masyarakat. Gereja sering berperan sebagai mediator dalam konflik, menjadi pendorong dialog antaragama, dan mengajarkan pentingnya toleransi serta perdamaian dengan kelompok tertentu di kabupaten yahukimo ini.(Hulu,dkk.2024)

Gereja pada hakikatnya hadir untuk melayani Tuhan dan menjadi pelayan bagi sesama manusia sebagai wujud nyata dari panggilan ilahi. Pelayanan gereja tidak hanya terbatas pada aspek spiritual dan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dalam merespons persoalan-persoalan kemanusiaan yang dihadapi jemaat dan masyarakat luas. Dalam konteks Kabupaten Yahukimo, konflik sosial yang berkepanjangan menempatkan gereja pada posisi strategis untuk menjalankan peran pelayanannya secara kontekstual dan transformatif.(Poroe dkk. 2024)

Jadi, Menjadi pelayan Tuhan merupakan sebuah panggilan yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi. Seorang pelayan Tuhan dituntut untuk hidup dengan penuh kehati-hatian, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh terhadap Tuhan dan sesama, serta menunjukkan perilaku hidup yang selaras dengan Firman Tuhan. Pemahaman yang benar tentang panggilan dan prinsip-prinsip pelayanan menjadi landasan penting agar gereja dan para pelayannya mampu menjalankan tugas pelayanan secara bertanggung jawab, terutama dalam situasi konflik yang sarat dengan penderitaan dan ketidakadilan. Dalam menghadapi konflik sosial di Yahukimo, gereja dipanggil untuk mengaktualisasikan karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan melalui pelayanan yang membangun, menenangkan, dan memulihkan kehidupan masyarakat.

Kondisi Sosial Masyarakat Adat Kabupaten Yahukimo Papua

Kondisi Kabupaten Yahukimo dengan kondisi Geografis dan Topografis Kabupaten Yahukimo terletak di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua, dengan Ibukota Dekai. Secara astronomis, Yahukimo terletak pada 138045' sampai 140014' Bujur Timur dan 3039' sampai 5002' Lintang Selatan dan berada pada ketinggian 100–3000 M dari permukaan air laut. Secara geografis, Kabupaten Yahukimo berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, dan Kabupaten Keerom di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel, dan sebelah barat berbatasan Kabupaten Nduga.(Giban 2019)

Masyarakat adat Yahukimo terdiri dari berbagai kelompok suku yang secara kultural dan linguistik sangat beragam. Terdapat dua belas suku dengan bahasa yang berbeda-beda yang hidup dan menetap dalam satu wilayah administratif yang sama. Keberagaman ini merupakan kekayaan sosial dan budaya yang membentuk identitas kolektif masyarakat Yahukimo.(Arisandi 2023) Namun, di sisi lain, perbedaan bahasa, adat istiadat, serta sistem sosial tradisional juga memerlukan pendekatan sosial yang sensitif agar relasi antar kelompok tetap terjaga secara harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Yahukimo masih sangat bergantung pada tanah, hutan, dan alam sebagai sumber kehidupan utama. Relasi yang kuat dengan alam tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga spiritual dan kultural.(Parto, Riyanto, dan Adon 2024) Tanah adat dipahami sebagai ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki makna sakral. Oleh karena itu, setiap bentuk gangguan terhadap ruang hidup masyarakat adat, baik melalui konflik sosial, kekerasan, maupun kebijakan pembangunan yang tidak partisipatif, berpotensi menimbulkan luka sosial yang mendalam. Kondisi geografis yang sulit, keberagaman suku, serta keterbatasan akses pelayanan publik menjadikan masyarakat adat Yahukimo berada dalam posisi rentan terhadap konflik sosial. Konflik yang terjadi tidak hanya berdampak pada keamanan fisik, tetapi juga mengganggu tatanan sosial, kehidupan ekonomi, pendidikan, dan relasi antar komunitas. Dalam konteks inilah, keberadaan gereja memiliki peran penting sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan memahami konteks sosial-budaya setempat. Gereja diharapkan mampu hadir tidak hanya sebagai pusat pelayanan rohani, tetapi juga sebagai ruang pendampingan sosial yang mendorong perdamaian, keadilan, dan pemulihan bagi masyarakat adat Yahukimo.

Solusi Penyelesaian Konflik Terhadap masyarakat Berkontribusi Oleh Gereja

Konflik sosial yang dialami oleh masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo papua memerlukan pendekatan penyelesaian yang tidak semata-mata bertumpu pada aspek keamanan, tetapi mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialogis, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, gereja memiliki kontribusi strategis sebagai institusi sosial-keagamaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat adat dan memiliki legitimasi moral yang kuat. Kehadiran gereja membukakan proses penyelesaian konflik dilakukan secara kontekstual, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan pengalaman hidup masyarakat.

Penelitian oleh “Yakup Heluka dkk,2023” menjelaskan bahwa; Resolusi konflik dipahami sebagai suatu proses pemecahan masalah yang menekankan pendekatan kooperatif dan efektif, di mana konflik dilihat sebagai persoalan bersama yang perlu diselesaikan melalui kerja sama antar pihak yang terlibat. Pendekatan ini berbeda dengan resolusi konflik yang bersifat destruktif dan kompetitif, yang cenderung menempatkan pihak-pihak dalam posisi

saling berhadapan untuk menentukan pemenang dan pihak yang kalah. Pola penyelesaian yang kompetitif semacam ini sering kali tidak menghasilkan solusi yang berkelanjutan, bahkan memperparah kerugian sosial bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. (Heluka, Erniwati, dan Halim 2023) Dalam konteks Yahukimo, pahami dengan resolusi konflik yang kooperatif dan konstruktif menjadi sangat relevan untuk menjawab konflik sosial yang dialami masyarakat. Maka kehadiran gereja dapat memiliki peran strategis dalam mendorong proses penyelesaian konflik yang berlandaskan kerja sama, dialog, dan rekonsiliasi. Melalui kontribusi pastoral, mediasi sosial, serta penguatan nilai-nilai perdamaian dan keadilan, gereja dapat membantu menggeser pola penyelesaian konflik dari pendekatan kompetitif menuju pendekatan kolaboratif yang menekankan pemulihan relasi dan kesejahteraan bersama masyarakat Yahukimo.

Dalam hal ini, melalui kebijakan yang relevan, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan warisan budaya salah satu yaitu: Tradisi Bakar Batu. Salah satu fungsi penting dari tradisi dengan tradisi adat istiadat lainnya. adalah sebagai sarana penyelesaian konflik secara adat tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan antar pihak yang bertikai. (Kabunggul 2025), maka dari itu, kebijakan publik yang mengakui peran tradisi dalam resolusi konflik dapat memperkuat stabilitas sosial di tingkat lokal, Tradisi Bakar Batu memiliki nilai penting dalam memperkuat keharmonisan sosial dan pembangunan masyarakat di Pegunungan Papua. ini menjadi momen kebersamaan yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana syukur dan solidaritas, salah satu solusi penting yang dapat dikontribusikan gereja adalah membangun ruang dialog dan rekonsiliasi dan kesatuan dalam Kristus menuntut penghapusan segala bentuk pemisahan dan hierarki sosial, serta menegakkan keadilan sebagai manifestasi kasih Allah. (Kobak, Widia, dan Nunung 2025)

Salah satu solusi menyelesaikan konflik merupakan gereja dapat berperan sebagai mediator yang mempertemukan masyarakat, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait untuk membangun komunikasi yang jujur dan damai. Melalui pendekatan pastoral dan dialog terbuka, gereja membantu meredakan ketegangan, memulihkan relasi sosial yang rusak, serta mendorong penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Gereja juga memiliki peran profetis dalam menyuarakan keadilan dan membela hak-hak masyarakat adat. Kontribusi ini diwujudkan melalui advokasi kemanusiaan, menyampaikan suara kenabian terhadap praktik ketidakadilan, serta penguatan kesadaran kritis jemaat tentang pentingnya perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yang dialami masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas kondisi geografis, keragaman sosial-budaya, keterbatasan pelayanan publik, eksploitasi sumber daya alam, serta pendekatan keamanan yang berdampak pada rasa aman dan kehidupan sosial masyarakat. Kerentanan masyarakat adat semakin diperparah oleh lemahnya perlindungan hak-hak dasar, termasuk kebebasan beragama, hak atas tanah adat, dan hak untuk hidup secara bermartabat.

Dalam konteks ini, konflik sosial bukan semata persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan dan keadilan struktural yang membutuhkan manusia melalui holistik. gereja memiliki peran strategis dan signifikan dalam merespons konflik sosial di Yahukimo sebagai institusi iman sekaligus aktor sosial yang memiliki legitimasi moral dan kedekatan kultural dengan masyarakat adat. Melalui pelayanan pastoral, mediasi konflik, advokasi kemanusiaan, serta pendidikan perdamaian yang berakar pada nilai-nilai Kristiani dan kearifan lokal, gereja mampu berkontribusi dalam membangun rekonsiliasi, memulihkan relasi sosial, dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang terdampak konflik. Oleh karena itu, peran gereja perlu terus diperkuat secara kontekstual dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lainnya agar dapat mendorong penyelesaian konflik yang damai, adil, dan bermartabat bagi masyarakat adat Kabupaten Yahukimo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi selama proses penulisan artikel ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan kajian akademik dan upaya membangun perdamaian serta keadilan bagi masyarakat adat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arisandi, F. (2023). *Politik hukum pemerintahan daerah terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebong* (Disertasi doctoral). Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Giban, A. (2019). *Bab III tinjauan wilayah Kabupaten Yahukimo*.
- Heluka, Y., Erniwati, & Halim, A. (2023). Strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik di organisasi pelajar mahasiswa Yahukimo Papua di Kota Makassar. *CORE: Journal of Communication Research*, 1(2), 47–56. <https://doi.org/10.47650/core.v1i2.886>

- Heriyanto, Y. Y. (2025). Moderasi beragama dalam perspektif etika Kristen: Menemukan titik temu dalam perbedaan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 3843–3857. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19471>
- Hulu, A. P. T., Anggraini, D. F., & Bambang, M. (2024). Kontribusi dan peran gereja dalam membangun solidaritas pelayanan sosial di Asia. *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral*, 3(2), 136–143. <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.464>
- Kabunggul, O. (2025). Tradisi bakar batu pada masyarakat Provinsi Papua Pegunungan Kabupaten Yahukimo dalam perspektif kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara AsIAN*, 13(1), 16–28. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v13i1.305>
- Kobak, H. Y. (2025). Analisis seruan rakyat Papua atas konflik perampasan sumber daya alam di Papua: Respons solidaritas internasional dan peran Dewan HAM PBB. *Edusola: Journal Education, Sociology and Law*.
- Kobak, H., Widia, D., & Nunung, D. S. (2025). Menyatu dalam Kristus: Menemukan kebenaran dan kedamaian melalui Kolose 3:11 dalam menanggapi diskriminasi kulit hitam di Papua. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 2(8), 1402–1416. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i8.1572>
- Kurita, N. (2025). Gereja GIDI desak Prabowo dan Panglima TNI hentikan operasi militer di Papua jelang Natal. *Tribun Papua*. <https://papua.tribunnews.com/news/122011/gereja-gidi-desak-prabowo-dan-panglima-tni-hentikan-operasi-militer-di-papua-jelang-natal>
- Paragaye, Y. L. (2025). Peran kepala suku dalam mengantisipasi konflik sosial pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jayawijaya. <https://eprints.ipdn.ac.id/24840/1/yuan%20repositori%20perbaikan.pdf>
- Parto, H. G., Riyanto, F. X. E. A., & Adon, M. J. (2024). Keseimbangan alam dan manusia: Menyibak nilai-nilai ekologis budaya suku Dayak Krio berdasarkan perspektif ekologi Thomas Berry. *Jurnal Batavia*, 1(3), 145–158. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i3.55>
- Poroe, H., Pasaribu, E. H., Idayanti, E., & Poli, M. J. (2024). Motivasi pelayanan musik remaja di Gereja IFGF Jakarta menurut 1 Timotius 4:6–16. *Jurnal Apokalupsis*, 15(2), 203–216. <https://doi.org/10.52849/apokalupsis.v15i2.146>
- Sanjaya, Y., Huatama, V. A., & Tafonao, T. (2024). Kepemimpinan gereja dan politik: Menggerakkan suara-suara Kristen untuk transformasi politik kontemporer. *AMBASSADORS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.54369/ajtpk.v3i2.60>
- Sihombing, U. P. (2025). Pemantauan Komnas HAM atas peristiwa kekerasan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk pada 21–22 Maret 2025 dan peristiwa penyerangan pendulang emas pada 6–9 April di Kabupaten Yahukimo. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/files/20250516-keterangan-pers-nomor-23-hm-00-%24OD31D.pdf>
- Simbolon, A. A. P. (2025). Hak masyarakat adat atas praktik penambangan ilegal di wilayah ulayat (Studi kasus: Kampung adat Gelar Alam).

- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wetipo, R. H., & Ismail, M. G. S. (2025). *Partisipasi masyarakat dalam akselerasi penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.